

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, Willian N. 2014. *Public Policy Analysis an Integrated Approach Fifth Edition*. Inggris: Pearson Education Limited.
- Dunn, Willian N. 2018. *Public Policy Analysis an Integrated Approach Sixth Edition*. New York: Routledge.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Parsons, Wayne. 2017. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 2015. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.”
- Wasistiono, Sadu, Ismail Nurdin, dan dan M. Fahrurozi. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokusmedia.
- ### Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Personil Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sekadau Hilir.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sekadau Hulu.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Nanga Taman.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Nanga Mahap.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Belitang Hilir.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Belitang Hulu.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Belitang.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau.

Keputusan Bupati Sekadau Nomor 100/179/Pem/2016 tentang Penetapan Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang Hulu, dan Kecamatan Belitang sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau.

Artikel Penelitian/Jurnal

Ali, Laher dan A. Masrich. 2017. Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah. *E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 6 (1): 56-71.

Ali, Zaini. 2017. Peranan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. 3 (2): 361-365.

Arief, Muhammad. 2010. Studi Evaluasi Implementasi Kebijakan Walikota Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Kecamatan untuk melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. *Jurnal Academica Fisip Untad*. 2 (2): 486-504.

Dilando D., Arfan dan Febri Yuliani. 2017. Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Rumbai Pesisir. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 4 (2): 1-15.

Gormico, Andrew, Redatin Parwadi, dan Endang Indri Listiani. 2013. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura*. 1-18.

- Gunawan, Endang. 2012. Implementasi Pelimpahan Kewenangan dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. 10 (1): 40-46.
- Hadi, Asmara. 2016. Strategi Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 2 (3): 36-48.
- Hidayat, Rian dan Ali Yusri. 2014. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat Bidang Pekerjaan Umum di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2011-2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 1-9.
- Isgunandar, Hasrat Arief Saleh, dan Nurlinah. 2011. Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4 (1): 15-22.
- Kurniawan, Iwan. 2011. Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Layanan Perizinan Bidang Kesehatan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Layanan Perizinan Depot Isi Ulang Air Minum Mineral). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. 8 (2) 159-171.
- Laksana, Agung Wara, Bambang Supriyono, dan Sarwono. 2015. Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 4 (3): 506-517.
- Manurung, Agustriani Susanti, Heri Kusmanto dan Usman Tarigan. 2018. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area*. 6 (1): 47-57.
- Mardani, Moh. Iskandar. 2011. Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Otonomi Daerah (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delekatif Bupati kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Academica Fisip Untad*. 3 (1): 547-563.
- Meiyenti, Ira dan Abdi Praja Ari Putera. 2017. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang kepada Kecamatan dalam Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*. 9 (2): 143-156.
- Muslim dan Riswati. 2016. Kesiapan Kecamatan dalam Menerima dan Melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati

kepada Camat di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wahana Bhakti Praja*. 6 (1): 55-66.

Nugroho, Arif dan Delly Maulana. 2019. Kedudukan Ganda Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah dan Perangkat Wilayah: Pemenuhan Elemen *Necessary Conditions* dalam Penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*. 3 (2): 97-112.

Nurkhalish, Ahmad. 2012. Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-537 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Kasus di Kecamatan Semboja). *Jurnal Paradigma*. 1 (2): 93-111.

Prastiwi, Merlia Indah. 2015. Otonomi Daerah di Tingkat Kecamatan Studi Keefektifan Otonomi dan Peran Masyarakat. *DIMENSI - Journal of Sociology*. 8 (2): 1-20.

Pratama, Ryan Anggria. 2018. Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3 (1): 52-93.

Pribadi, Gentur Wiku dan Kismartini. 2016. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Management Review*. 5 (1): 1-11.

Pujiastuti, Toha Budi Sri, Ardiyan Saptawan, dan Dadang Hikmah Purnama. 2015. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*. 3 (1): 29-38.

Sagita, Novie Indrawati. 2018. Dilema Pelimpahan Wewenang Walikota dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Bandung. *Jurnal Transparansi*. 1 (2): 244-258.

Suparman, Nanang. 2017. Evaluasi Kebijakan Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. 2 (2): 159-178.

Tarmizi, Rahayu Putri. 2016. Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. 14 (3): 211-216.

Ubaidillah, Hasan. 2020. Analisa Pengaruh Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati terhadap Efektivitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Bisnis dan Perbankan UMSIDA*. 6: 116-124.

Utomo, Tri Widodo W. 2004. Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 1 (2): 17-30.

Zulpikar. 2010. Karakteristik Wilayah sebagai Basis Pendelegasian Kewenangan Kecamatan Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Wacana Kinerja*. 13 (2): 153-172.

Tesis

Abdurrahman Sang (2004). Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur). Tesis. Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yogyakarta.

Yudi Ridhani (2006). Pendelegasian Kewenangan Kecamatan (Studi Kasus pada Kota Banjarmasin). Tesis. Program Studi Magister Administrasi Publik Konsentrasi Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yogyakarta.

Muhammad Evinuddin (2009). Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Otonomi Daerah (Studi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Soppeng). Tesis. Program Studi Magister Administrasi Publik Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Otonomi Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yogyakarta.

Zikri Vebri Prima (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Lampung Barat. Tesis. Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yogyakarta.

Muhammad Arif Rahman (2020). Dinamika Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Sleman. Tesis. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yogyakarta.

Dokumen Pemerintah

Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau.

Data Konsolidasi Semester 2 Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau.

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016.

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2017.

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2019.

Buku Profil Kabupaten Sekadau 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau.

Surat Bupati Sekadau Nomor:100/582/ Pem-A/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang *launching* PATEN di Kecamatan Sekadau Hilir.

Surat Bupati Sekadau Nomor:100/2095/Pem-A/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Undangan.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Nomor:100/2172/Pem-A tanggal 6 November 2019 tentang Undangan Rapat.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Nomor:100/2242/Pem-A tanggal 18 November 2019 tentang Undangan Rapat.

Rujukan Elektronik

<[https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=Monitoring%20is%20primarily%20concerned%20with%20establishing%20factual%20premises%20about%20public%20policies%2C%20while%20evaluation%20\(Chapter%207\)%20is%20concerned%20with%20establishing%20value%20premises.%20&op=translate](https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=Monitoring%20is%20primarily%20concerned%20with%20establishing%20factual%20premises%20about%20public%20policies%2C%20while%20evaluation%20(Chapter%207)%20is%20concerned%20with%20establishing%20value%20premises.%20&op=translate)> diakses pada tanggal 18 November 2020.

<https://translate.google.com/?hl=id&sl=en&tl=id&text=a%20case%20study%20is%20the%20in-depth%20investigation%20of%20an%20individual%2C%20group%2C%20or%20institution&op=translate> diakses pada tanggal 23 November 2020.



<https://translate.google.com/?hl=id&sl=en&tl=id&text=Policy%20actions%20may%20also%20be%20further%20subdivided%20into%20policy%20inputs%20and%20policy%20processes.%20Policy%20inputs%20are%20the%20resources%20time%20money%20personnel%20equipment%20supplies%20used%20to%20produce%20outputs%20and%20impacts.%20Policy%20processes%20are%20the%20administrative%20organizational%20and%20political%20activities%20and%20attitudes%20that%20shape%20the%20transformation%20of%20policy%20inputs%20into%20policy%20outputs%20and%20impacts.&op=translate>
diakses pada tanggal 23 November 2020.